



WARGA SUMUT TUNTUT NETRALITAS PILKADA

Kapolda Diminta Bersih-bersih Jajaran

Medan, MIMBAR – Ratusan warga didominasi kaum ibu melakukan unjukrasa di Mapolda Sumut, Senin (18/11/2024) siang. Mereka meminta Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februnto untuk bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan segera berlangsung bulan ini di wilayah Sumatera Utara.

■ Bersambung ke Hal 11



SEPEKAN OPS BESAR POLDA SUMUT

Ratusan Tersangka Narkoba Diamankan

Medan, MIMBAR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu satu minggu, dari 11 November 2024 hingga 18 November 2024. Operasi masif ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

■ Bersambung ke Hal 11

Dua Desa di Indonesia Jadi Desa Wisata Terbaik di Dunia 2024



Medan, MIMBAR - Dua desa wisata di Indonesia yang terletak di Bali dan Yogyakarta didapat jadi yang terbaik di

dunia versi UN Tourism 2024. Keduanya adalah Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali dan Dewa Wisata Wukirsari, Bantul,

DI Yogyakarta.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung pada Jumat (15/11) lalu dalam gelaran yang keempat kalinya di Kolombia.

Desa Wisata Jatiluwih dan Desa Wisata Wukirsari berhasil terpilih dari 260 kandidat desa wisata lainnya yang berasal dari 60 negara.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik penghargaan yang diraih kedua desa wisata tersebut.

“Saya sangat bangga dan optimistis penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa wisata

■ Bersambung ke Hal 11



Komdigi Perkuat Pengawasan Internal

Jakarta, MIMBAR - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran konten judi online atau judol di ruang digital.

■ Bersambung ke Hal 11

Lanjutan Kasus Tom Lembong

Kebijakan Impor Gula Tanggungjawab Jokowi

KUASA hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.

Zaid menilai kebijakan impor gula tersebut telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula tidak sah.

“Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan



demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah,” kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Zaid menyebutkan, kebijakan impor gula yang dibuat Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi bukan tindak pidana.

“Bahwa pada faktanya ke-

bijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan (policy maker) adalah ranah hukum administrasi negara sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana,” ujar Zaid.

■ Bersambung ke Hal 11

Terkait Kasus APD Kemenkes

KPK Usut Pabrik Air Minum dalam Kemasan

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keberadaan aset berupa pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) yang terletak di Bogor, Jawa Barat, saat memeriksa Agus Subarkah (wiraswasta), akhir pekan lalu (15/11). Agus Subarkah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Sylvana selaku Pejabat Pembuat Komitmen

■ Bersambung ke Hal 11



Hakim PN Medan Dilaporkan ke KPK

MIRIP KASUS RONALD TANNUR

Medan, MIMBAR - Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) dan Nasional Corruption Watch (NCW) resmi melaporkan Hakim Pengadilan Negeri PN Medan yang memvonis lepas atau onslag pasangan suami istri (Pasutri) yang merugikan perusahaan sebesar Rp583 miliar ke KPK.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

17 JUMADIL AWAL 1446 H

Subuh : 04:53 WIB	Maghrib : 18:12 WIB
Zuhur : 12:14 WIB	Isya : 19:24 WIB
Ashar : 15:36 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Netralitas Pilkada Harga Mati

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UIINSU)



TUNTUTAN warga Sumatera Utara (Sumut) terhadap netralitas dalam Pilkada adalah wajar dan penting untuk memastikan demokrasi yang sehat, transparan, dan adil. Netralitas harus ditegakkan dan suatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar dan dipermainkan. Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia,

■ Bersambung ke Hal 11



■ Masih bisa?
■ Hehehe...

Israel Hantam Situs Senjata Iran

Teheran, MIMBAR - Militer Israel menggempur fasilitas militer Iran dan menghancurkan alat canggih hingga mengganggu kemampuan pengembangan bom nuklir. Serangan itu terjadi pada Oktober lalu di Fasilitas Telegan 2 Parchin Provinsi Teheran. Iran kerap menggunakan situs ini untuk menguji bahan peledak untuk perangkat nuklir sebelum 2003. Dua sumber Israel mengatakan serangan pasukan Zionis menghancurkan peralatan canggih Iran. "Ini adalah peralatan yang dibutuhkan

Iran jika mereka ingin mengembangkan bom nuklir," kata pejabat senior Israel, dilansir Jerusalem Post, Ahad (17/11). Peralatan tersebut sangat penting untuk membentuk dan menguji bahan peledak plastik yang membungkus uranium dalam perangkat nuklir Iran. Perangkat itu, kata dia, juga penting untuk memulai reaksi berantai nuklir Iran. Para sumber Israel mengatakan Iran telah menyimpan alat itu di Parchin sejak 2003 dan tak lagi digunakan. Namun, mereka meyakini senjata tersebut bisa digunakan di masa depan

jika Iran mengembangkan bom nuklir. Para sumber juga menyebut jika Iran ingin mengembangkan program bom nuklir, mereka harus mengganti peralatan yang hancur. "Sekarang, mereka tak punya, dan mencari alternatif tidak akan mudah. Kami akan memantau upaya semacam itu," ujar pejabat senior Israel. Namun, mereka yakin pihak berwenang Israel atau sekutu dekatnya Amerika Serikat akan mendeteksi pergerakan Iran untuk memperoleh alat itu. "Peralatan ini menjadi hambatan. Iran tak

akan bisa mendapatkan," kata salah satu dari mereka. Iran pernah menggunakan peralatan canggih itu sebelum membekukan program nuklir pada 2023. Berapa tahun terakhir, Iran diduga terus melanjutkan penelitian terkait senjata nuklir. Pejabat AS dan Israel melaporkan Iran terus melakukan aktivitas ilmiah yang bisa menjadi dasar pengembangan senjata nuklir. Namun, beberapa pihak menyebut aktivitas itu bisa disajikan sebagai penelitian sipil. "Mereka melakukan pekerjaan ilmiah yang

bisa menjadi dasar produksi senjata nuklir," kata salah satu pejabat AS. Dia lalu berujar, "Pekerjaan itu sangat rahasia dan hanya diketahui sebagian kecil pejabat pemerintah Iran." Serangan Israel ke situs militer Iran sebagai balasan usia Korps Revolusi Garda Iran (IRGC) menggempur Negeri Zionis dengan rudal pada awal Oktober. Israel baru membalas pada 26 Oktober. Selama menyerang mereka menargetkan fasilitas militer di Teheran, Khuzestan, dan Ilam. **(cnni/js)**

KPK Usut...

Dari Halaman 1 (PKK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemendes. Aset dimaksud diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemendes) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020. "Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan pembelian aset pabrik air minum dalam kemasan yang terletak di wilayah bogor oleh tersangka SW [Satrio Wibowo], Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiaro melalui keterangan tertulis, Senin (18/11). Dalam kasus dugaan korupsi

si pengadaan APD ini, lembaga antirasuah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan sudah melakukan penahanan. Mereka ialah PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kemendes Budi Sylvana; Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo; dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara disebut mengalami kerugian sejumlah Rp319.691.374.183,06 (Rp319 miliar). Tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan pengeledahan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dimaksud. **(cnni/js)**



Netralitas Pilkada...

Dari Halaman 1 dan netralitas berbagai pihak terutama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu merupakan prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Mengapa netralitas penting dalam Pilkada? Ini tidak lain adalah menjamin kepercayaan publik. Jika Pilkada berjalan dengan netral, masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilu dan legitimasi kepemimpinan yang terpilih. Ketidaknetralan dapat memicu konflik antar kelompok pendukung yang berujung pada polarisasi masyarakat. Netralitas menjamin semua peserta Pilkada diperlakukan setara sesuai aturan, tanpa keberpihakan pada salah satu kandidat. Demokrasi yang sehat membutuhkan penyelenggara, aparat, dan pemimpin daerah yang tidak memihak. Ketidaknetralan dapat mencoreng proses demokrasi. Pihak yang harus menunjukkan netralitas adalah Aparatur Sipil Negara. ASN sering menjadi sorotan dalam Pilkada karena posisi mereka sebagai pelaksana kebijakan. Netralitas ASN diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang melarang mereka menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Kemudian Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung tanpa manipulasi atau pengaruh dari pihak tertentu, serta menindak pelanggaran secara tegas dan adil. Aparat Penegak Hukum dan Keamanan. Kepolisian dan TNI harus menjamin keamanan Pilkada tanpa memihak. Penggunaan institusi keamanan untuk kepentingan politik dapat mencederai netralitas. Media juga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, netralitas media dalam pemberitaan selama Pilkada menjadi elemen penting. Tantangan dalam Menjaga Netralitas di Sumut karena pengaruh elite lokal. Elite politik atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar di daerah terkadang berupaya memanfaatkan jaringan untuk mendukung kandidat tertentu. Disamping itu karena praktik politik uang sering kali menjadi tantangan yang merusak netralitas. Begitu juga ASN sering kali berada dalam posisi

sulit jika ada tekanan dari atasannya untuk mendukung kandidat tertentu. Dukungan yang kuat terhadap kandidat tertentu di tingkat lokal dapat memengaruhi netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Solusi untuk Menjaga Netralitas yakni penegakan hukum yang tegas. Bawaslu harus bertindak tegas terhadap pelanggaran, termasuk memproses kasus politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan aparat. Adanya transparansi proses Pilkada. Seluruh proses Pilkada, mulai dari pendaftaran kandidat hingga penghitungan suara, harus diawasi oleh publik dan dilaporkan secara terbuka. Adanya edukasi masyarakat. Warga perlu didorong untuk memahami pentingnya netralitas dan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Pemantauan oleh Organisasi Independen. Kehadiran pemantau independen (seperti LSM dan organisasi masyarakat) dapat meningkatkan tekanan untuk menjaga netralitas. Media harus diawasi agar tidak memberikan keberpihakan kepada kandidat tertentu, baik secara langsung maupun melalui iklan terselubung. Tuntutan netralitas oleh warga Sumut dalam Pilkada adalah langkah positif untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Semua pihak yang terlibat—baik penyelenggara, ASN, aparat keamanan, maupun media—harus bekerja sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum. Dengan demikian, hasil Pilkada dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, sehingga stabilitas dan kemajuan daerah tetap terjaga. Pilkada tanpa netralitas dapat membawa berbagai dampak buruk yang merugikan demokrasi, stabilitas sosial, dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi: Tanpa netralitas, Pilkada tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merusak stabilitas sosial, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, menjaga netralitas dalam Pilkada adalah tanggung jawab bersama, melibatkan penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan pengawas independen untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Netralitas tentu saja merupakan harga mati, yang tidak boleh ditawar-tawar. *******

Dari Halaman 1

Dua terdakwa pemalsuan tanda tangan direktur perusahaan, Yansen (66) dan Meliana Jusman (66) divonis lepas oleh Majelis Hakim PN Medan pada Selasa, 6 November 2024. Ketua Umum Baradatu, Herwanto Nurmansyah mengatakan, pihaknya secara resmi melaporkan 3 Hakim ke KPK, yakni M. Nazir sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan sebagai Hakim Anggota dan Khairulludin sebagai Hakim Anggota. "Sekarang kami menyampaikan surat secara resmi kepada KPK. Kami meyakini ini bisa jadi dugaan kami akan menjadi peristiwa seperti Ronald Tannur di Surabaya jilid duanya," kata Herwanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta

Dari Halaman 1

lainnya di Indonesia untuk terus mengoptimalkan potensi kekayaan alam, warisan budaya, serta pemberdayaan masyarakatnya desa menuju pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Widiyanti dalam keterangannya, akhir pekan kemarin (16/11). Menukul situs resmi Kemenparekraf, pengembangan desa wisata di Indonesia telah menjadi program unggulan kementerian dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut sejalan dengan visi pembangunan desa yang tertuang dalam prioritas

Dari Halaman 1

Koordinator aksi, Asari mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta Kapolda Sumut dan jajaran netral dalam tahapan Pilkada Sumut tahun ini. "Kita masyarakat Sumatera Utara, kita menuntut pihak Polda Sumut untuk bertindak adil, tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024 ini," ujar Asari. Menurut Asari, polisi selaku pelaksana tugas fungsi aparat pemerintah tidak cawe-cawe, harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. "Bertindak adil lah, itu tuntutan kita dari

Dari Halaman 1

Untuk itu, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyatakan, akan menambah personel pengawas, di tengah penyidikan kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. "Kalau kemarin yang 10 (pegawai) sudah dinonaktifkan. Kita akan terus menambah personel untuk menjaga. Intinya kita komitmen untuk memberantas judi online ini," kata Angga di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyampaikan, dalam operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil menangkap puluhan tersangka yang terdiri dari pedagang dan pengguna. Barang bukti yang disita meliputi berbagai jenis narkoba, termasuk sabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya. "Dalam sepekan, kami mengamankan barang bukti signifikan, di antaranya sabu seberat 5,71 kilogram, ganja seberat 5,71 kilogram, tiga pohon ganja, 31 butir ekstasi, 1.408 butir excimer, dan 220 butir tramadol. Selain itu, kami juga menyita uang tunai sebesar Rp 12.410.000, 18 unit HP atau tablet, satu mobil, satu sepeda motor, lima alat isap, serta beberapa timbangan digital," ujar Kombes Hadi di Medan, Senin (18/11).

Dari Halaman 1

Menurut Zaid, Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi. Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan. Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara a quo, terang Zaid, Kejaksaan Agung menasar pada kebijakan Tim Lembang semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016. Zaid menjelaskan kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun

Selatan, Senin, 18 November 2024. Herwanto menerangkan, sebelumnya pihaknya juga sudah melapor kepada Komisi Yudisial (KY) terkait putusan PN Medan tersebut. "Kalau KY memanggil dan memeriksa Majelis Hakim ini, saya meyakini sangat meyakini dugaan bahwa ada pelanggaran kode etik, saya meyakini itu pasti ketemu. Cuma kalau pidananya kita belum bisa memastikan, apakah ada transaksi? Apakah ada dugaan tindak pidana korupsi?" terang Herwanto. Herwanto mengaku curiga putusan PN Medan yang memutus onslag yang artinya ada peristiwa tapi bukan tindak pidana. Namun, Hakim tidak menjelaskan apakah surat kuasa yang dibuat terdakwa pasutri itu palsu atau tidak. "Kalau memang majelis hakim meyakini bahwa

Dua Desa...

nasional Asta Cita Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Best Tourism Villages Awards sendiri digelar untuk menjangkau desa percontohan yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan komunitas masyarakat setempat dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal. Hingga tahun 2024, sebanyak 245 desa di dunia telah tergabung dalam Best Tourism Villages Network yang diharapkan menjadi jejaring desa wisata global terbesar. Keberhasilan yang diterima Desa Wisata

Kapolda Diminta...

warga masyarakat Sumatera Utara. Kita dari pergerakan masyarakat Sumatera Utara," terang Asari. Ditanya apakah pihaknya ada menemukan keberpihakan (cawe-cawe, red) dilakukan oleh ASN atau Polri, Ashari menyebut Kepala Desa (Kades) di Tapanuli Selatan (Tapsel) diduga melakukannya. "Seperti yang kita sampaikan dalam pernyataan sikap kita di Tapsel dan ada beberapa wilayah yang kita dapatkan informasinya. Maka di sini kita meminta pihak Kapolda agar memproses itu segera," pinta Asari. Ashari menyatakan, pihaknya menemukan dugaan cawe-cawe yang dilakukan oknum Polisi

Komdigi Perkuat...

Menurut Angga, Kemkomdigi juga meningkatkan komitmen pegawai untuk memberantas konten judi online melalui penanaman rasa cinta tanah air. "Kita meningkatkan cinta tanah air mereka. Saya yakin komitmen teman-teman di dalam semakin baik. Kemarin kan hanya oknum-oknum," tuturnya. Wamenkomdigi berharap melalui penguatan secara internal, kasus serupa yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi tidak akan terulang kembali. "Mereka juga ingat mereka punya keluarga.

Ratusan Tersangka...

Menurutnya, salah satu pengungkapan terbesar dilakukan oleh Polrestabes Medan, yang menyita 264 gram sabu dan 447 butir tramadol. Polres Samosir turut berkontribusi dengan mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti uang tunai Rp 900.000. Kombes Hadi juga menyoroti tantangan yang semakin kompleks dalam memberantas narkoba di Sumatera Utara. "Peredaran narkoba kini tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Medan, tetapi juga merambah ke wilayah perbatasan dan pedesaan. Ini menjadi perhatian serius kami untuk terus meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah hukum Polda Sumut," ujar mantan Kapolres Numfor Biak Polda Papua ini. Ia juga menekankan pentingnya sinergi Polri dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi terkait aktivitas

Kebijakan Impor...

2014 Tentang administrasi pemerintahan. "Dalam hal ini penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan domain hukum pidana," ujarnya. Zaid menambahkan, penahanan terhadap Tom Lembang juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP. "Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan terhohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito. Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembang meminta hakim tunggal Tump-

ini bukanlah peristiwa tindak pidana, harusnya idealnya putusannya menyatakan surat ini adalah asli. Bebaskan saja orang, jangan onslag. Ya ini kan putusan onslag ini putusan banci itu," tuturnya. Dengan tidak adanya kesimpulan terkait surat dimaksud kata Herwanto, menimbulkan analisa bahwa surat yang dibuat kedua terdakwa tersebut adalah palsu. "Nah, cuma yang dibahas disini peristiwa nya bukanlah peristiwa tindak pidana. Nah, ini yang menurut kami agak kontradiktif ya, antara putusan dengan laporan. Sehingga tadi disini juga hadir NCW, ya artinya ada dugaan tindak pidana, kira-kira seperti itu," pungkasnya. Setelah membuat laporan ke KPK, Baradatu bersama Nasional Corruption Watch (NCW) akan mengadu kepada Komisi III DPR. **(rm/js)** Jatiluwih di Bali dan Desa Wisata Wukirsari di DIY pada 2024 bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Desa Nglangeran di DIY pada tahun 2021 dan Desa Penglipuran di Bali pada tahun 2023 juga memenangkan kategori penghargaan yang sama. Hal tersebut tentu menjadi bentuk pengakuan desa wisata Indonesia di hadapan dunia. "Tentunya tidak boleh berpuas diri atas capaian ini. Kami di Kemenpar akan terus berupaya memperkuat ekosistem desa wisata di dalam negeri melalui komitmen kolektif demi kemajuan pariwisata Indonesia," ujar Widiyanti. **(cnni/js)**

di wilayah Sumatera Utara. Namun lanjut Asari, pihaknya tidak bisa menyebutkan nama dari oknum tersebut, karena ini masih dugaan. "Iya ada dugaan, namun kita tidak bisa menyebutkan seseorang cuma kita ada dugaan itu," terangnya. Karena itu, Asari meminta Kapolda Sumut agar bersih-bersih diri baik itu institusi dan jajaran yang ada di bawahnya. Setelah dari Polda Sumut, Asari mengaku pihaknya akan menuju kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menggelar aksi serupa. "Kita juga meminta pihak Pj Gubsu jangan cawe-cawe. Kita juga meminta agar tidak pilih kasih," pungkasnya. (A-10) Saya yakin itu hanya oknum-oknum saja yang kemarin. Kami berharap juga tidak akan terulang kembali," harapnya. Angga juga menyatakan dukungan atas upaya Kepolisian Republik Indonesia memberantas judi online dan menyelesaikan kasus yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi. "Tadi malam kita baru dengar ada lagi yang ditangkap. Kita mendukung Polri dalam hal ini aparat penegak hukum untuk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk membasmi judi online," pungkasnya. **(rm/js)**

mencurigikan. "Kami sangat mengapresiasi dukungan masyarakat yang terus melaporkan aktivitas mencurigikan. Tanpa mereka, upaya ini tidak akan seefektif saat ini," tambah Kombes Hadi. Di akhir keterangannya, Kombes Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam memberantas peredaran narkoba. "Upaya ini adalah tanggung jawab kita bersama demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," seru mantan Wadirlantas Polda Kalteng ini. Keberhasilan operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menekan angka peredaran narkoba di Sumatera Utara, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Polisi juga berkomitmen untuk terus memperkuat operasi dan pengawasan guna mewujudkan wilayah bebas narkoba di masa depan. **(R/A-10)** anuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembang direhabilitasi atau dipulihkan. Tom Lembang bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016. Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar. Tom Lembang dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhiting sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan. Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan jenjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan. **(cnni/js)**